

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata

1. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata
Triwulan II Tahun 2026**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II 2026	Realisasi s.d Triwulan II 2026	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan					
1.1	Indikator 1.1 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Jumlah Perjalanan (juta)	1.200	599,54	523,22*	87,27
1.2	Indikator 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan (juta)	17-18	7,753	7,596*	97,97
1.3	Indikator 1.3 Persentase Penyelesaian Konsep Muatan Substansi Tata Kelola Program IQTF	Persentase	100	45	45	100
II	Sasaran Program 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Persentase	80	50	50	100
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata					

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II 2026	Realisasi s.d Triwulan II 2026	Capaian (%)
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,5 dari 4	100
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata	Persentase	92	46	46	100

*Angka proyeksi internal per Mei 2026

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Program 1: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
----------	---

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan menjadi dua indikator kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara
2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
3. Persentase Penyelesaian Konsep Muatan Substansi Tata Kelola Program IQTF

1.1. Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara

Latar Belakang

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) adalah jumlah perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia ke destinasi di dalam wilayah Indonesia untuk keperluan wisata, rekreasi, atau kegiatan pribadi lainnya di luar rutinitas sehari-hari dalam kurun waktu tertentu. Kunjungan tersebut tidak termasuk perjalanan yang bertujuan untuk bekerja sebagai aktivitas utama, bersekolah atau menempuh pendidikan formal, serta tidak dimaksudkan untuk berpindah domisili.

Dalam rangka mendukung indikator ini, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penguatan ekosistem event termasuk perizinan, standarisasi venue, SDM, dan lainnya sehingga dapat meningkatkan kuantitas event yang diselenggarakan dan berkontribusi positif terhadap peningkatan pergerakan maupun kunjungan wisatawan nusantara. Kehadiran sistem digital ini juga turut mempermudah koordinasi lintas instansi, mempercepat proses persetujuan, serta mendorong terciptanya lebih banyak event yang pada akhirnya dapat menjadi pemicu peningkatan mobilitas dan kunjungan wisatawan nusantara ke berbagai daerah. Selain itu, dalam pengembangan ekosistem pariwisata juga dilaksanakan melalui integrasi dan penetrasi ekosistem asuransi dalam ekosistem pariwisata untuk meningkatkan tata kelola risiko dalam aspek keselamatan pariwisata

Selain itu, untuk mendukung indikator ini juga dilakukan upaya penguatan ekosistem pariwisata melalui penguatan tata kelola risiko pariwisata, penguatan ekosistem wisata tematik, serta penguatan SDM pariwisata dalam rangka mendukung pariwisata yang berkualitas.

Indikator ini penting sebagai cerminan perkembangan sektor pariwisata domestik yang digerakkan oleh wisatawan nusantara, termasuk memahami minat dan preferensi wisatawan nusantara dalam menjelajahi, mengenal, dan menikmati keragaman destinasi serta potensi wisata yang tersebar di Indonesia.

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dalam kegiatan pariwisata domestik. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dapat mencerminkan minat dan daya beli masyarakat terhadap produk dan jasa wisata di dalam negeri, serta memberikan gambaran mengenai distribusi dan potensi ekonomi pariwisata antarwilayah. Minat dan daya beli masyarakat terhadap produk dan jasa wisata di dalam negeri dapat menjadi acuan untuk merencanakan dan menetapkan target pembangunan khususnya pada sektor pariwisata

Hasil Pengukuran Kinerja

Jumlah perjalanan Wisatawan Nusantara diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbaharui setiap 3 bulan (triwulan). Total Perhitungan jumlah perjalanan Wisatawan Nusantara pada Triwulan II dihitung selama periode April s.d Juni tahun berjalan. Adapun rincian Realisasi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara hingga TW II 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.1 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Jumlah Perjalanan (juta)	1.200	599,54	523,22*	87,27

*per Mei 2026

Capaian TW II sebesar 87,27% (data per Mei 2026) dan diproyeksikan mencapai 112% dengan realisasi sebesar 1.210 jumlah perjalanan wisatawan nusantara pada akhir tahun didukung adanya stimulus berupa diskon transportasi berupa diskon tiket kereta, angkutan laut, angkutan penyeberangan, dan tiket pesawat pada periode liburan seperti idul fitri dan nataru. Selain itu, juga didukung dengan perbaikan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi baru, dan paket wisata yang menarik

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator 1.1 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1	Eskalasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat eselon I untuk penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait Digitalisasi Layanan Perizinan Event	Terlaksana	Dilaksanakan koordinasi dengan Setdukkab, Kemenpar dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan event dan desa wisata pada 2 April 2026.
2	Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait Digitalisasi Layanan Perizinan Event	Terlaksana	1. Penyusunan renaksi dalam pengembangan event dan desa wisata di tanggal 2 April 2026; 2. Telah dilaksanakan integrasi ekosistem asuransi ke dalam ekosistem asuransi melalui pengembangan asuransi pariwisata dalam FGD <i>Pilot Project</i> Labuan Bajo melalui MoU dan PKS dengan Pemkab

			Manggarai Barat dan ASITA DPD NTT. FGD menghasilkan pembelajaran atas masukan para pelaku usaha, kendala dan kebutuhan industri pariwisata dalam implementasi asuransi pariwisata dan didukung ADB dengan pelaksanaan kajian pengembangan ekosistem asuransi pariwisata pada 21 April 2026.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, telah dilaksanakan kegiatan dengan berbagai stakeholder untuk penguatan ekosistem pariwisata seperti audiensi untuk penguatan ekosistem *health dan wellness tourism* melalui audiensi pembahasan usulan pembentukan Indonesia Health Tourism Board (IHTB) pada 18 Mei 2026 serta pelaksanaan Bali *Beauty and Wellness* pada 4 Juni 2026. Selain itu, dalam rangka penguatan ekosistem asuransi di Indonesia, juga telah dilaksanakan sejumlah koordinasi untuk penyusunan kajian bersama dengan tim TA Asian Development Bank, dengan tema *Assessment and Design of Indonesia Tourism Insurance Ecosystem* dengan Pilot Project di Labuan Bajo. Isu lain yang juga dibahas adalah terkait pembatasan kunjungan wisatawan ke Pulau Komodo dan Pulau Padar di Labuan Bajo, dimana terkait hal ini telah dilakukan rapat koordinasi pada 26 April 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan II tahun 2026 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi pengembangan destinasi pariwisata sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 30 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang dilakukan pada triwulan ini. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi pada setiap rencana aksi yaitu:

1. Pengembangan digitalisasi perizinan event terkendala aspek pembiayaan dalam pengembangan aplikasi full version dengan kebutuhan pembiayaan 5-10 miliar
2. Terjadinya insiden kecelakaan pada beberapa destinasi pariwisata yang berpengaruh pada citra Indonesia dimata dunia, sehingga perlu

dilakukan penguatan tata kelola risiko pariwisata untuk mendukung pariwisata yang berkualitas.

Berdasarkan kendala tersebut dan capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Cakupan program pengembangan event harus dilihat secara penguatan ekosistem event, tidak hanya melihat dari sisi digitalisasi perizinan event saja.
2. Dalam digitalisasi penyelenggaraan event perlu disusun regulasi untuk penguatan komitmen para pemangku kepentingan dalam kolaborasi serta dasar acuan dalam mekanisme dan pembiayaan pengembangan aplikasi perizinan penyelenggaraan event.
3. Penguatan aspek keamanan, keselamatan, dan mitigasi kebencanaan terutama pada destinasi yang menjadi kegiatan prioritas di tahun 2026.
4. Pelaksanaan identifikasi masalah dan tata kelola risiko pariwisata pada destinasi yang menjadi kegiatan prioritas di tahun 2026.

1.2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Latar Belakang

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara adalah Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) adalah jumlah orang asing yang melakukan perjalanan ke suatu negara lain (dalam hal ini Indonesia) untuk tujuan wisata, yang tidak terkait dengan pekerjaan atau pendidikan, dan berlangsung kurang dari enam bulan.

Indikator jumlah kunjungan wisatawan wisman memiliki fungsi strategis sebagai salah satu tolok ukur kinerja sektor pariwisata nasional. Data ini tidak hanya mencerminkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata global, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Semakin tinggi angka kunjungan wisman, maka semakin besar pula potensi pemasukan devisa negara dan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui sektor pariwisata.

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator ini, program kerja Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata berfokus pada peningkatan konektivitas dan aksesibilitas destinasi pariwisata, terutama destinasi wisata prioritas dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata yang memiliki potensi besar dalam menarik minat wisatawan mancanegara.

Indikator jumlah kunjungan wisman digunakan untuk melihat performa pariwisata internasional Indonesia dan sebagai cerminan daya tarik destinasi wisata Indonesia di mata global. Data kunjungan ini juga menjadi acuan penting dalam mengevaluasi kebijakan konektivitas dan aksesibilitas pariwisata.

Hasil Pengukuran Kinerja

Jumlah perjalanan Wisatawan Nusantara diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbaharui setiap 3 bulan (triwulan). Total Perhitungan jumlah perjalanan Wisatawan Nusantara pada Triwulan II dihitung selama periode April s.d Juni tahun berjalan. Adapun rincian Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara hingga TW II 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan (juta)	17-18	7,753	7,596*	97,97

*angka proyeksi internal

Capaian TW II 2026 diproyeksikan mencapai 97,97% dengan proyeksi realisasi sebesar 7,753 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Data jumlah kunjungan dari BPS baru tersedia hingga Mei 2026 dengan jumlah 6,067 juta. Adapun target proyeksi yang dibuat didukung dengan beroperasinya rute PP Singapura - Tj. Pandan melalui Maskapai Scoot

sejak Mei 2026. Selain itu, beberapa rute internasional juga baru beroperasi seperti PP Jakarta-Incheon pada 29 April 2026 dengan maskapai T'way Air, PP Jakarta-Guangzhou pada 16 Juni 2026 dengan maskapai Spring Airline, PP Jakarta-Shenzhen pada 17 Juni 2026 dengan maskapai Spring Airline, PP Pontianak-Singapura pada 29 Juni 2026 dengan maskapai Scoot.

Namun demikian, pergerakan wisman juga dipengaruhi oleh gejolak geopolitik di Timur Tengah. Penutupan hub transit di Timur Tengah serta kenaikan harga avtur juga menjadi kendala bagi wisman ke Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah juga melakukan koordinasi guna meningkatkan daya saing pariwisata berupa perluasan kebijakan bebas visa kunjungan bagi 8+1 negara.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

Indikator 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Eskalasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat eselon I untuk penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait peningkatan konektivitas dan aksesibilitas	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rakor Tingkat eselon I terkait Kebijakan Bebas Visa Kunjungan pada 15 April 2026 dan 9 Juni 2026
2.	Penyusunan alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait peningkatan konektivitas dan aksesibilitas	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rakor Pemetaan Stimulus dalam rangka Mendorong Kontribusi Sektor Pariwisata bagi Pertumbuhan Ekonomi Semester II Tahun 2026 pada 9 Juni 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja adalah dengan melaksanakan:

1. Mengikuti Rakor Pelaksanaan Kebijakan Harga Avtur bagi Industri Penerbangan yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi ESDM pada 7 Mei 2026;
2. Mengikuti Rakor Nasional Pariwisata Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemenpar pada 20 Mei 2026;

3. Mengikuti Tourism Investment Dialogue - Investment to Boost Tourism Attraction pada 2 Juni 2026;

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya dengan melaksanakan rakor di dalam kantor. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan ini. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi pada setiap rencana aksi yaitu:

1. Kenaikan harga avtur menyebabkan harga tiket pesawat meningkat;
2. Kondisi ekonomi global berpengaruh terhadap nilai tukar yang juga menyebabkan perubahan harga;
3. Perluasan Kebijakan BVK pada 8+1 negara masih dalam tahap penyiapan kajian pendukung di Kemenlmpas.

Berdasarkan kendala tersebut dan capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Pemerintah memberikan insentif berupa subsidi avtur;
2. Dalam rangka kestabilan indikator makro yang secara langsung berdampak terhadap biaya berwisata, pemerintah meluncurkan beberapa stimulus guna menunjang kestabilan nilai tukar;
3. Kemenpar telah menyiapkan kajian dengan UGM serta Kemenko Ekon juga menyiapkan telaah kebijakan sebagai bahan analisa.
4. Kemenko Ekon juga secara internal membuat telaah kajian terkait perluasan kebijakan bebas visa kunjungan sebagaimana dimaksud.

1.3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata

Latar Belakang

Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; dan (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Pariwisata; (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Isu strategis terkait bidang pembiayaan pengembangan pariwisata mencakup penyusunan draf regulasi tentang Dana Pariwisata Berkualitas (DPB).

Persentase keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan bidang pembiayaan pengembangan pariwisata dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :

- a. Tahap 4, rentang persentase 72,5 – 100%
- b. Tahap 3, rentang persentase 46 – 72,5%
- c. Tahap 2, rentang persentase 21 – 45%
- d. Tahap 1, rentang persentase 0 – 20%

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata diukur dari realisasi pelaksanaan sudah sampai tahap yang mana. Adapun rincian Realisasi Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata hingga TW II 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan I	Realisasi	% Kinerja
IKU 1.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata	Persentase	100	45	45	100

Realisasi triwulan II 2026 menunjukkan bahwa saat ini keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang pembiayaan pengembangan pariwisata masuk dalam Tahap 2, yaitu Penyusunan Alternatif Rekomendasi, atau penyelesaian sebesar 45%, melalui koordinasi pembentukan Tim Penyusunan Tata Kelola Dana Pariwisata Berkualitas (IQTF).

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 1.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pembiayaan Pengembangan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Eskalasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Es1 I untuk penyelesaian isu strategis dan permasalahan muatan substansi tata kelola program IQTF	Tertunda dan digeser	
2	Penyusunan Alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait muatan substansi tata	Terlaksana	1. Koordinasi pembentukan Tim Penyusun Tata Kelola Dana Pariwisata Berkualitas (IQTF) 2. Penyusunan draf Keputusan Deputi 5

	kelola program IQTF		Kemenko Perekonomian mengenai Tim Penyusun Tata Kelola Dana Pariwisata Berkualitas (IQTF)
--	---------------------	--	---

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian berupa usulan nama anggota tim penyusunan tata kelola Dana Pariwisata Berkualitas (IQTF)

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan II tahun 2026 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan rapat koordinasi dan diskusi terkait isu isu strategis pariwisata di sektor pariwisata sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan ini. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu belum terselesaikannya paraf persetujuan dari Menteri Pariwisata dan Menteri Keuangan terhadap draf RPerpres IQTF.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun rekomendasi perbaikan melalui koordinasi dengan Kemenpar dan Kemenkeu mengenai hambatan pemberian paraf persetujuan dari Menpar dan Menkeu.

2

Sasaran Program 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan menjadi dua indikator sebagai berikut:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Latar Belakang

Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: (a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; (b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; (c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Pengembangan Pariwisata; dan (d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Pariwisata; (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Persentase Efektivitas SKP di lingkup Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata adalah:

1. Regulasi mengenai Badan Otorita Pariwisata
2. Regulasi mengenai Tugas dan Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur

Persentase keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan tata kelola destinasi pariwisata dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori :

- a. Tahap 4, rentang persentase 72,5 – 100%
- b. Tahap 3, rentang persentase 46 – 72,5%
- c. Tahap 2, rentang persentase 21 – 45%
- d. Tahap 1, rentang persentase 0 – 20%

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata diukur dari realisasi pelaksanaan sudah sampai tahap yang mana. Adapun rincian Realisasi Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata hingga TW II 2026 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan IV	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	-------------------	--------------------	-----------	-----------

IKU 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Persentase	80	50	50	100
---	------------	----	----	----	-----

Realisasi TW II 2026 menunjukkan bahwa saat ini keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan tata kelola destinasi pariwisata masuk dalam Tahap 2, yaitu Penyusunan Alternatif Kebijakan dengan realisasi capaian sebesar 50%. Pada tahap tersebut, unit kerja telah:

1. Menyelenggarakan pembahasan dan koordinasi penyusunan rancangan MoU pemanfaatan 4 candi yang melibatkan 4 K/L pusat dan 2 Pemda.
2. Beraudiensi dengan Pimpinan Daerah Jawa Tengah dan Pemda DIY terkait rencana penyusunan MoU pemanfaatan 4 Candi.
3. Kemenpar mengirimkan surat permohonan untuk pengisian jabatan kosong di Badan Otorita Pariwisata kepada Kemenko Ekon selaku Dewan Pengarah.
4. Kemenpar mengirimkan kajian Penyempurnaan Regulasi Badan Otorita Pariwisata dan agar Kemenko Ekon dapat mengoordinasikan revisi perpres BOP.

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Tata Kelola Destinasi Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Eskalasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Es I untuk penyelesaian isu strategis dan permasalahan tata kelola destinasi pariwisata	Terlaksana	1. Menyelenggarakan audiensi dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah terkait rencana pembaruan MoU Pemanfaatan 4 candi pada 28 dan 29 April 2026; 2. Menghadiri dan Menyusun bahan Rapat koordinasi Nasional Pariwisata yang diadakan Kemenpar dan dihadiri oleh Menko Perekonomian dan

			Menteri lainnya.
2	Penyusunan Alternatif penyelesaian isu strategis dan permasalahan terkait tata kelola destinasi pariwisata	Terlaksana	1. Menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi RIDPN pada 4 dan 26 Februari 2026. 2. Menghadiri Forum Pendalaman Kerangka Kelembagaan RKP 2027 terkait Kerangka Kelembagaan BOP dan IQTF pada 17 dan 18 Juni 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja adalah dengan menghadiri Rapat Koordinasi Revalidasi, Validasi Unesco Global Geopark, serta Penguatan Kapasitas Pengelola dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Geopark tanggal 13-15 April 2026 di Kab. Belitung.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya pada Triwulan II tahun 2026 adalah penggunaan aplikasi *teleconference* dalam melakukan diskusi teknis terkait tata kelola destinasi pariwisata sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar 20 juta rupiah. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi atau monitoring evaluasi yang akan dilakukan pada triwulan ini. Selain efisiensi pada operasional rencana aksi, pengelolaan persuratan secara digital juga diupayakan untuk meningkatkan kemudahan akses bekerja sekaligus memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran melalui pengurangan belanja alat tulis kantor.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi BP BUMN menyatakan tidak berkenan dilibatkan sebagai pihak terkait dalam MoU pemanfaatan 4 candi dan menyarankan untuk diganti ke Danantara.

Berdasarkan kendala tersebut dan capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai adalah dengan:

1. Berkoordinasi dengan Danantara;
2. Mendorong percepatan penandatanganan PKS dan MoU;
3. Diskusi dengan Menko Perekonomian untuk permohonan izin penyelenggaraan rakor Dewan Pengarah BOP dan peran Kemenko Ekon sebagai Ketua Dewan Pengarah.

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata

Latar Belakang

Terwujudnya Layanan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata yang Berkualitas berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan pariwisata; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pengembangan pariwisata; (c) pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pengembangan pariwisata; (d) pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain terkait bidang pengembangan pariwisata; (e) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan pariwisata. Sasaran Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata yang berkualitas dapat tercapai apabila unit kerja mampu menjalankan proses bisnis dengan baik (sebagaimana penjabaran poin a hingga e), serta produk yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut dapat menunjang kualitas perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Pariwisata merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 4 Aspek yakni (1) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan; (2) Pengendalian pelaksanaan kebijakan; (3) pengelolaan dan penanganan isu; (4) penyelesaian isu yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga; dan (5) pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh dua indikator yakni Indikator Proses dan Indikator Hasil. Survey ini terdiri 21 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target indeks kepuasan layanan SKP pada tahun 2026 adalah 3 dari 4. Penetapan target 2026 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asdep Pengembangan Pariwisata Tahun 2026.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Pariwisata pada tahun 2026 telah dilaksanakan Survey Kepuasan Layanan Semester I kepada stakeholder terkait. Adapun rincian Realisasi Indeks Kepuasan layanan SKP hingga TW II 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan II	Realisasi	% Kinerja
IKU 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,5	150%

Pada Triwulan II Tahun 2026 telah tercapai 50% dari target kinerja yang direncanakan, dengan skor survei sebesar 3,5. Capaian ini didukung oleh terlaksananya berbagai kegiatan sesuai rencana kerja pada semester pertama, termasuk pelaksanaan survei, peningkatan kualitas layanan, serta koordinasi dan monitoring secara berkala. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup baik dan menjadi dasar untuk melakukan evaluasi serta penyempurnaan pelaksanaan program pada Triwulan IV agar target kinerja tahunan dapat tercapai secara optimal

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1	Pelaksanaan Survey Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Pariwisata Smt 1	Terlaksana	Telah dilaksanakan survey SKP Semester I 2026 melalui surat permohonan menjadi partisipan survey Nomor B/RB.02/26/D.V.M.EKON.6/07 /2026

	Tahun 2026		
2	Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Pariwisata Smt 1 Tahun 2026	Terlaksana	Telah tersusun ringkasan data hasil survey kepuasan layanan Smt I Keasdepan Pengembangan Pariwisata

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut: Telah dilaksanakan sosialisasi mekanisme pengisian survei kepuasan layanan setelah dilaksanakan rapat koordinasi lintas sektor.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan survei yang menggunakan Google Form. Pengelolaan tata persuratan secara digital juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi anggaran karena dengan adanya digitalisasi maka mengurangi belanja alat tulis perkantoran.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, kendala utama dalam pencapaian target yang ditetapkan adalah:

1. Tingkat partisipasi responden dalam pengisian survei belum optimal, sehingga mempengaruhi representativitas hasil survei dan pencapaian skor yang diharapkan.
2. Pelaksanaan beberapa kegiatan pendukung mengalami penyesuaian jadwal karena keterbatasan waktu dan koordinasi antarunit, sehingga implementasi program belum dapat berjalan secara maksimal pada Triwulan II.

Berdasarkan kendala tersebut dan capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada selanjutnya adalah:

1. Meningkatkan sosialisasi dan tindak lanjut kepada responden untuk mendorong partisipasi dalam pengisian survei, sehingga jumlah dan kualitas data yang diperoleh lebih optimal.
2. Memperkuat koordinasi antarunit melalui penyusunan jadwal yang lebih terstruktur, monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala, serta percepatan penyelesaian kegiatan yang masih tertunda agar target kinerja pada triwulan berikutnya dapat tercapai.

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata

Latar Belakang

Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata yang Baik.

Tata kelola Asisten Deputi merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka mendorong dan memacu terselenggaranya program keasdepan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, program keasdepan ditunjang dengan kegiatan administrasi tata kelola yang mana merupakan suatu proses kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang mempengaruhi pengelolaan suatu unit kegiatan. Untuk mewujudkan hal tersebut harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta sistem pengawasan internal yang efektif.

Nilai akhir akumulasi digunakan untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja eselon II.

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RKP Tahun 2026 dan Perjanjian Kinerja Asdep Pengembangan Pariwisata Tahun 2026. Adapun target triwulan II 2026 sebesar 46% atau mencapai 3 paket dokumen. Pemilihan target ini berdasarkan progres penyusunan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya dan juga berdasarkan tren-tren tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 46% atau mencapai 100% kinerja.

Adapun rincian Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata hingga TW II 2026 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan IV	Realisasi	% Kinerja
IKU 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata	Persentase	92	46	46	100

Pada Triwulan II Tahun 2026, Asdep Pengembangan Pariwisata telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II 2026. Dalam rangka optimalisasi implementasi Srikandi, Asdep Pengembangan Pariwisata telah memproses naskah masuk dan naskah keluar melalui Srikandi secara optimal. Asdep Pengembangan Pariwisata juga telah melakukan monitoring capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan Dialog Kinerja dan penyusunan Sasaran Kinerja Tahun 2025. Selanjutnya Asdep Pengembangan Pariwisata telah melakukan optimalisasi pengelolaan data kinerja sistem kinerja Ekon-GO. Pelaporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Output melalui Aplikasi E-Monev

Pelaksanaan Rencana Aksi Triwulan II 2026 dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II	Terlaksana	Sudah dilakukan penyusunan Laporan Kinerja TW II dan di upload di <i>website</i> kinerja.ekon.go.id
2	Penyusunan Revisi Renja 2027	Terlaksana	Sudah dilakukan pembahasan awal terkait Renja 2027
3	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI Triwulan II	Terlaksana	Semua surat masuk dan keluar dilakukan melalui SRIKANDI

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah dengan berpartisipasi dalam sosialisasi terkait agen perubahan sebagai bentuk implementasi dari reformasi birokrasi

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya anggaran dengan terdapat tempat penyimpanan file berbasis cloud dengan pemberian akses dokumen yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja untuk meningkatkan kinerja, pengelolaan tata persuratan secara digital sebagai bentuk kemudahan akses bekerja, dilakukan lebih banyak koordinasi yang dilaksanakan secara daring/online sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat tercipta dengan baik pada DIPA Anggaran Kegiatan Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata.

Efisien Belanja dalam pelaksanaan APBN TA 2025 berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Nomor:PR.02.01/35/SET.M.EKON.1/01/2025 tanggal 24 Januari 2025 dengan penghematan seluruh pos belanja (Belanja Operasional dan Non Operasional) yang dibiayai oleh APBN dengan rincian jenis belanja sebagai berikut Alat Tulis Kantor, Kegiatan Seremonial, Rapat, Seminar dan sejenisnya, Kajian dan Analisis, Diklat dan Bimtek, Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi, Percetakan dan Souvenir, Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan, Lisensi Aplikasi, Jasa Konsultan, Bantuan Pemerintah, Pemeliharaan dan Perawatan, Perjalanan Dinas, Peralatan dan Mesin, Infrastruktur, dan Belanja Lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 belum ada kendala dalam pelaksanaan RB. Terdapat beberapa penyesuaian dan rencana aksi untuk mencapai target agar memberikan kinerja yang baik dan menciptakan reformasi birokrasi yang memuaskan.

Berdasarkan capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dilaksanakannya rapat koordinasi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan sumber daya yang maksimal untuk menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan kinerja.

Jakarta, 10 Juli 2026

Asisten Deputi Pengembangan
Pariwisata

\$_{ttd_pengirim}\$

Herfan Brilianto Mursabdo